

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pembingkai berita sanksi administratif bagi penolak vaksin COVID-19 di Indonesia pada *Kompas.com* dan *Suara.com*, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Kompas.com* dan *Suara.com* membingkai isu pemberian sanksi denda dan penghentian jaminan sosial bagi penolak vaksinasi COVID-19 sebagai pemaksaan hak warga negara dan mengancam kebebasan rakyat. Tindakan pemerintah tidak menjadi solusi dalam menanggulangi penolakan vaksinasi di Indonesia.
2. Pembingkai berita pada *Kompas.com* dan *Suara.com* dipengaruhi oleh penempatan posisi wartawan, penggunaan sumber berita, dan pemakaian kata dalam menggambarkan suatu peristiwa.
3. Dalam membingkai isu penerapan sanksi administratif bagi penolak vaksin COVID-19, *Kompas.com* dan *Suara.com* yang secara jelas berpihak pada orang-orang yang menolak vaksinasi COVID-19. Kedua media terlihat mempunyai orientasi untuk mengkritik tindakan pemerintah. Media secara tidak langsung membantu menyuarakan suara rakyat yang “tidak terdengar” melalui penggunaan sumber berotoritas.
4. Tidak hanya melihat peristiwa, cara media memperhitungkan khalayak pembaca akan menggambarkan posisi yang diambil oleh wartawan. Pembingkai sanksi sebagai “ancaman” dan “tidak tepat”, lalu penolak vaksinasi sebagai masyarakat yang “bebas” dan “berhak menolak vaksinasi” menunjukkan keberpihakan media pada penolak vaksinasi.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Untuk mengembangkan penelitian kedepannya, disarankan agar menggunakan peristiwa lain berkaitan dengan kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19, terlepas dari peristiwa pemberian sanksi bagi penolakan vaksin COVID-19. Pada penelitian di masa mendatang, penelitian analisis *framing* akan lebih baik apabila jumlah berita yang digunakan lebih banyak dibandingkan dengan dalam penelitian saat ini sehingga data yang dihasilkan lebih objektif dan beragam.

5.2.2 Saran Praktis

Saran praktis ditujukan untuk *Kompas.com* dan *Suara.com*. Terlepas dari penekanan posisi yang dilakukan oleh media, alangkah lebih baik apabila kedua media juga menampilkan informasi dari pandangan pemerintah untuk menghasilkan isi berita yang lebih objektif.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA